

## **PENGELOLAAN BUMDES DI PANGKALAN TAMPOI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**

**Oleh :** M. Sabda Abdyagra

**Pembimbing:** Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 yang ditinjau berdasarkan dengan indikator yang menjadi dasar pertumbuhan dari Desa Pangkalan Tampoi. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang dikelola langsung oleh masyarakat dan juga Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat ekonomi Desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kab Pelalawan. Pendekatan dari penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik ini pengumpulan data dimulai dengan melakukan wawancara kepada informan yang berpotensi memberikan informasi yang akurat tentang proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi, dan juga melalui wawancara dan dokumentasi hasil-hasil dari pengelolaan BUMDes. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Sutoro Eko yang mana terdapat beberapa indikator yaitu Kepemimpinan, Manajerial dan Tata Kelola (KMT), Skala dan Jangkauan Usaha, Emansipasi Lokal, Kerjasama, Tradisi Berdesa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Pangkalan Tampoi sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu, BUMDes Pangkalan Tampoi dalam pengelolaannya masih dibidang dalam tahap berkembang. Saat ini BUMDes berjalan cukup lambat sehingga belum mencapai tujuan berdirinya BUMDes tersebut hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi. Faktor faktornya adalah partisipasi dari masyarakat yang rendah, dukungan dari pemerintah desa dan kerjasama mitra yang kurang. Kesimpulan pengelolaan BUMDes Pangkalan Tampoi belum cukup baik, dibandingkan dengan BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Pelalawan.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa

## ABSTRACT

*This research was carried out with the aim of knowing the management of Pangkalan Tampoi Village-Owned Enterprises, Kerumutan District, Pelalawan Regency in 2023, which was reviewed based on the indicators that are the basis for the growth of Pangkalan Tampoi Village. Village-Owned Enterprises are institutions that are managed directly by the community and also the Village Government in an effort to strengthen the Village economy. This research aims to find out the process of managing Village-Owned Enterprises in Pangkalan Tampoi Village, Kerumutan District, Pelalawan District. The research approach used is descriptive qualitative. By using this technique, data collection begins by conducting interviews with informants who have the potential to provide accurate information about the management process of Pangkalan Tampoi Village-Owned Enterprises, and also through interviews and documenting the results of BUMDes management. The theory used in this research is Sutoro Eko, which contains several indicators, namely Leadership, Managerial and Governance (KMT), Business Scale and Reach, Local Emancipation, Cooperation, Village Traditions.*

*The research results show that BUMDes Pangkalan Tampoi has been established for 3 years, BUMDes Pangkalan Tampoi in its management is still in the developing stage. Currently BUMDes is running quite slowly so that it has not achieved the goal of establishing BUMDes, this can be proven by the many obstacles that occur. The factors are low community participation, support from the village government and lack of partner cooperation. The conclusion is that the management of BUMDes in Pangkalan Tampoi is not good enough, compared to BUMDes in Pelalawan Regency.*

*Keywords: Management, Village-Owned Enterprises*

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pembukaan Undang-Undang 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Miriam Budiardjo menjelaskan pemerintah pusat mempunyai wewenang menyerahkan sebagian kekuasaannya ke daerah berdasarkan hak otonomi. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagai mengatur daerahnya sendiri. Penyerahan sebagian kekuasaan itu karena Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi, dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap harus dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang.

Desa merupakan bagian dari wilayah sebuah kabupaten yang memiliki otonomi asli. Otonomi desa adalah kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta melakukan upaya pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Dalam bidang pemerintahan dan pembangunan inilah desa memiliki peran untuk membina masyarakat serta mengurus kepentingan desa. Desa memiliki Alokasi Dana Desa

(ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan juga memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (Barniat, 2018).

Penguatan peran desa bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa Hasil usaha desa yang dimaksud adalah hasil BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan tanah kas desa. Dari unsur-unsur PADes yang telah diuraikan, sebuah desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan di masyarakat, serta tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak yang bisa meningkatkan PADes. Dengan demikian diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka pemerintah mendirikan suatu Badan usaha milik desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. (Ifitah & Wibowo, 2022).

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang

bumdes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang badan usaha milik desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa.

Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi merupakan BUMDes milik Desa Pangkalan Tampoi yang berdiri sejak tahun 2019 dan mulai beroperasi 2020 didalam bumdes tersebut terdapat 3 unit usaha yaitu usaha depot air,

NO	TAHUN	NILAI KONTRIBUSI
1	2020	Rp. 2.500.000
2	2021	Rp. 1.800.000
3	2022	Rp. 700.000

kredit hp, dan lpg. Badan usaha milik desa (bumdes) ini kurang berjalan dengan lancar banyak hambatan yang terjadi seperti kurangnya dukungan baik dari dari desa, serta di dalam unit usaha juga terdapat beberapa kendala seperti pelanggan banyak yang tidak membayar, nasabah yang menunggak, banyak kerusakan alat alat di dalam unit usaha. Sehingga berpengaruh dengan pendapatan hasil dan kelancaran usaha BUMDes tersebut.

Bumdes dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa prinsip, salah satunya prinsip efektivitas. Efektivitas yang dimaksud merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas juga diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah

ditentukan. Untuk mencapai keefektifan, bumdes perlu dikelola secara profesional dan mandiri oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni dengan harapan bumdes mampu berjalan secara kooperatif, partisipasif, emansipasif, transparansi, akuntabel, serta berkelanjutan berdasarkan prinsip pengelolaan bumdes.

Berikut ini merupakan tabel daftar kontribusi dari Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

**Daftar kontribusi Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa pada tahun 2020-2022**

*Sumber : Bumdes Desa Pangkalan Tampoi 2023*

Di tabel tersebut dapat di lihat data kontribusi bumdes terhadap padas dari tahun ke tahun mengalami penurunan ini di sebabkan banyak kendala terhadap bumdes tersebut, kontribusi bumdes terhadap padas dimulai dari tahun 2020 yaitu senilai Rp. 2.500.000 di tahun 2021 Rp. 1.800.000 dan di tahun 2022 Rp. 700.000.

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja faktor penghambat tumbuh dan berkembang Badan Usaha Milik Desa di Desa Pangkalan Tampoi?

## **TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1. Tujuan Penelitian**

a. Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Pangkalan Tampoi (Penghulu Junjung), Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

b. Untuk mengetahui faktor Penghambat Badan Usaha Milik Desa di Desa Pangkalan Tampoi (Penghulu Junjung).

### **2. Manfaat Penelitian**

a. Secara subjektif, sebagai suatu tahapan proses dalam mengasah dan mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah dan kemampuan dalam penulisan berbentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari kajian ilmu pemerintahan.

b. Secara teoritis, bagi pemerintahan daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan berupa saran-saran dalam pengelolaan bumdes di desa pangkalan tampoi kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan.

c. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan pengetahuan dibidang ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya tentang bumdes.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. STUDI TERDAHULU**

Studi tentang pengelolaan bumdes telah dilakukan oleh beberapa peneliti pertama yaitu Rony Jaya, (2018) meneliti tentang analisis

hambatan dalam pengembangan bumdes (studi kampung rempak kabupaten siak). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan bumdes Rempak Maju Jaya Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak diantaranya yang paling menonjol adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola yang masih minim pengalaman dalam wirausaha sehingga berdampak pada stagnansi unit usaha bumdes, yang menjadi pembeda dengan peneliti adalah fokus lokasi dan juga kantor bumdes yang diteliti, peneliti berfokus pada kantor bumdes di Desa Pangkalan Tampoi.

(optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam meningkatkan pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (studi kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, 2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan bumdes dalam meningkatkan pendapatan asli desa belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa dimensi indikator yang belum terpenuhi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yang menjadi pembeda dengan peneliti adalah fokus lokasi dan juga kantor bumdes yang diteliti, peneliti berfokus pada kantor bumdes di Desa Pangkalan Tampoi .

### **2. KERANGKA TEORI BUMDes**

Menurut Maryunani, (2008) BUMDes ialah suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan

membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi bumdes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba). Maryuni, (2008).

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian desa, menurut Setyadi, (2003) adalah Pertama, pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di masyarakat. Kedua, berperan secara aktif dalam upaya-upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat desa. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan bumdes sebagai pondasinya. Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat di desa. Kelima, membantu masyarakat meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Sururama & Masdar, (2020).

### **DEFENISI KONSEPTUAL**

Definisi konseptual untuk mempermudah dalam pengertian dalam konsep-konsep yang ada di dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut: 1. Pengelolaan bumdes adalah merupakan usaha desa yang di kelola oleh pemerintah desa. 2. Kepemimpinan, manajerial dan tata kelola (KMT) merupakan faktor dasar yang menyokong kesehatan dan keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa. 3. Skala dan jangkauan usaha, Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan bisnis eksternal umumnya rentan dan gulung tikar karena skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang terbatas. 4. Emansipasi Lokal, bumdes yang tumbuh dari emansipasi lokal jauh lebih kuat dan berkelanjutan ketimbang bumdes yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas atau bumdes yang lahir dari pemerintah daerah. 5. Kerjasama, tidak adanya kerjasama ataupun tidak menjalin hubungan kerjasama yang baik antara bumdes akan menghambat pertumbuhan bumdes. 6. Tradisi Berdesa, tidak adanya tradisi berdesa yang paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik, berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan bumdes.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan,

menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dimana data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tersebut berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menerapkan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang di tujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan yaitu di kantor badan usaha milik Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan. Alasan penulis dalam menentukan lokasi penelitian yaitu dikarenakan lokasi tersebut masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pengelolaan badan usaha milik desa tersebut. hal itu ditandai dengan kurangnya sistem pengelolaan bumdes dan sekaligus masyarakat kurang bekerja sama terhadap badan usaha milik desa tersebut.

## **4. Jenis Data**

- a. Data Primer

- b. Data Sekunder

## **5. Sumber Data**

- a. Informan
- b. Dokumen

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi

## **7. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan-penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup setempat, dengan data kualitatif peneliti dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. (Ramadhoni, 2018).

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **1. Sejarah desa Pangkalan Tampoi**

Pada zaman dahulu penduduk desa Pangkalan Tampoi masih tinggal di pedalaman hilir sungai dan semua penghubung masih lewat jalan air. Daerah tempat tinggal orang tua masyarakat Pangkalan Tampoi sekarang di namakan pangkalan tuk tanggung yang berjarak 2 KM arah ke hilir sungai dari Pangkalan Tampoi sekarang ini.

Pada tahun 1962 penduduk desa Pangkalan Tampoi masih bermukim dan bertempat tinggal di Pangkalan Tuk Tunggang tersebut. Namun pada tahun 1975 mereka

mulai ke daerah lebih tinggi yang di sebut Pangkalan Tampoi, sedangkan nama Pangkalan Tampoi berasal dari sejenis pohon dalam hutan, dimana pohon tersebut sangat banyak dan buahnya sangat disukai oleh masyarakat yang baru pindah dari Pangkalan Tuk Tunggang.

Menurut para tetua masyarakat buah tampoi ini sangat mirip dengan buah manggis dan rasanya sangat manis. Perpindahan masyarakat Pangkalan Tuk Tunggang yang sekarang di sebut Pangkalan Tampoi juga di akibatkan karena mulai dibangunnya akses jalan yang di rintis oleh perusahaan Expan Pertamina, walaupun kondisi jalan masih dalam keadaan memprihatinkan namun akses jalan tersebut masih lebih baik dari pada melalui jalan air menuju ke desa lainnya. Kemudian kehidupan warga masyarakat yang semula menanam padi secara berpindah telah memulai menanam karet walaupun dalam hutan yang sangat lebat. Pada tahun 1996 terbangunlah masjid pertama secara swadaya dan dinamakan masjid nurul iman. Dimana pada saat itu Pangkalan Tampoi masih termasuk dalam bagian desa dari Kecamatan Kuala Kampa. Dan dengan mulai masuknya banyak perusahaan baik perusahaan HTI perhutanan berupa akasia dan perkebuna kelapa sawit, tetapi masih ada juga sebagian dari masyarakat Pangkalan Tampoi yang masih bermata pencarian sebagai nelayan.

## 2. Kondisi Geografis

Desa Pangkalan Tampoi terletak di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan daerah

berupa daratan dan terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi serta juga ada beberapa rawa yang mengelilingi Desa Pangkalan Tampoi tersebut.

Adapun batas-batas wilayah *Desa Pangkalan Tampoi* adalah sebagai berikut : 1. Utara berbatas dengan Desa Tanjung Air Hitam. 2. Selatan berbatas dengan Desa Mak Teduh. 3. Barat berbatas dengan Desa Lipai Bulan. 4. Timur berbatas dengan Desa Tanjung Kuyo.

## 3. Kependudukan

Berdasarkan pada data yang tertulis dalam data jumlah penduduk di Desa Pangkalan Tampoi berjumlah 2.145 jiwa. Berikut ini akan di sajikan data penyebaran penduduk Desa Pangkalan Tampoi berdasarkan jenis kelaminnya. penduduk Laki-Laki di Desa Pangkalan Tampoi sebanyak 1.105 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya 1.040 jiwa. Jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 2.145 jiwa yang ada di Desa Pangkalan Tampoi.

## 4. Sumber Penghasilan

### Jenis Pekerjaan Masyarakat Pangkalan Tampoi Tahun 2023

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	386 orang
2	Pedagang	76 orang
3	PNS	5 orang
4	Tukang	20 orang

5	Guru	10 orang
6	Bidan/Perawat	3 orang
7	TNI/Polri	0 orang
8	Wiraswasta	32 orang
9	Sopir/Angkutan	15 orang
	Jumlah	547 orang

Sumber : Data Kantor Desa Pangkalan Tampoi, 2023

## 5. Sejarah BUMDes Desa Pangkalan Tampoi

BUMDes Desa Pangkalan Tampoi merupakan milik Desa Pangkalan Tampoi yang di bangun pada tahun 2019 dan mulai beroperasi pada tahun 2020. Nama BUMDes Pangkalan Tampoi ini adalah Penghulu Junjung, lokasi kantor BUMDes Penghulu Junjung ini berjarak kurang lebih 200 M dari kantor Desa Pangkalan Tampoi.

BUMDes ini sudah beberapa kali melakukan renovasi mulai dari renovasi ruangan, pergantian cat dan dekorasi ruangan, kantor BUMDes ini berukuran sangat kecil yaitu dapat terlihat dari ruangan unit usaha nya hampir penuh dengan alat- alat unit usaha tersebut.

## 6. Visi dan Misi BUMDes Pangkalan Tampoi

### a. Visi BUMDes

Adapun visi BUMDes Desa Pangkalan Tampoi adalah sebagai berikut : “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pangkalan Tampoi Melalui Pengembangan Usaha Milik Desa

Dengan Semangat Kebersamaan Membangun Desa Menuju Desa Yang Lebih Maju dan Mandiri”.

### b. Misi BUMDes

Adapun misi BUMDes Desa Pangkalan Tampoi adalah sebagai berikut : 1. a. Membangun kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak. 2. b. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang usaha dan jasa. 3. Menggali potensi kegiatan ekonomi desa untuk lebih berkembang dan maju.

## PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Penghulu Junjung Pangkalan Tampoi

#### 1. Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Penghulu Junjung

Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi atau dengan nama Penghulu Junjung ini berdiri pada tahun 2019 dan mulai beroperasi pada tahun 2020 yang mana pembentukan dari Badan Usaha Milik Desa ini melalui musyawarah Desa. Musyawarah Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan perangkat Desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan dari perempuan (PKK).

Dalam peraturan Desa Pangkalan Tampoi mengenai Pembentukan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat beberapa mekanisme untuk pembentukan pengurus, dimana peraturan ini menyatakan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa harus dilaksanakan melalui

musyawarah Desa yang mana akan dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan memilih Badan Usaha Milik Desa secara Demokratis.

Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk melalui perwujudan dari masyarakat secara keseluruhan, dapat menghambat terbentunya cara usaha yang dikuasai oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab ditingkat Desa tersebut. tata cara yang baik akan membuat keterikatan antara sesama anggota. Dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini memiliki harapan besar untuk dapat meningkatkan pembangunan yang akan berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa yang mana nantinya akan dapat menjadi kesejahteraan tingkat Nasional.

## **2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi**

Harapan dari berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini agar mampu menggerakkan perekonomian yang ada di Desa. Seluruh aset ekonomi yang ada di Desa seharusnya dikelola penuh oleh masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa haruslah di jiwai dengan rasa kebersamaan sebagai cara untuk memperkuat aspek dari ekonomi kelembagaan. Badan Usaha Milik Desa ini dapat digerakkan sesuai dengan upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa, dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat Desa dimana Badan Usaha Milik Desa ini memiliki peran yang penting untuk menaungi Desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa ini juga sangat penting dalam mengurangi peran free-rider yang

mana seringkali menambah biaya transaksi dalam perekonomian masyarakat.

Adapun aktivitas dari BUMDes penghulu junjung ini yaitu dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMDes direktur mempunyai tugas untuk mengatur jalan kerjanya usaha usaha setiap harinya, dan didampingi oleh sekretaris untuk mencatat hal-hal yang diperlukan untuk kelanjutan BUMDes, melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi usaha BUMDes, mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes dan juga di damping oleh bendahara, yang mana tugas dari bendahara penghulu junjung ini yaitu untuk melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha badan usaha milik desa, selanjutnya kepala unit usaha BUMDes penghulu junjung mempunyai tugas yaitu sebagai menjalankan unit usaha BUMDes seperti mengisi air galon, mengantar air galon tersebut ke setiap warung warung mitra dan juga mengantar stok-stok LPG, selanjutnya kepala unit kredit hp melakukan tugas seperti menampung masyarakat yang ingin memiliki HP namun secara kredit, setiap bulannya kepala unit usaha kredit hp ini akan menagih kepada nasabah kredit hp tersebut.

## **3. Rencana Awal Pembentukan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa**

Rencana Usaha atau rencana bisnis memiliki peranan yang sangat penting ketika kita menjalankan sebuah usaha, dalam hal ini adalah BUMDes melalui unit usaha BUMDes. Perlu diperhatikan bahwa

dalam menjalankan sebuah usaha, diperlukan untuk membuat suatu perencanaan usaha yang matang, hal ini dimaksudkan agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan memiliki antisipasi ketika usaha tersebut nantinya mengalami hambatan.

Rencana usaha akan begitu berguna bagi setiap BUMDes ketika ingin mendirikan atau mengadakan unit usaha, pengelola BUMDes di setiap unit usahanya akan memerlukan suatu perencanaan unit usaha yang matang. Karena tanpa adanya sebuah perencanaan yang matang, unit usaha BUMDes akan sulit diprediksi ke mana arahnya dan perkembangannya nanti. Ketika sebuah unit usaha tidak memiliki tujuan, maka unit usaha dapat dipastikan tidak akan bertahan lama, atau mengalami kebingungan dalam menjalankan usahanya.

#### **4. Pelaksanaan Dalam Menjalankan Unit Usaha BUMDes**

1. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa / BUM Desa bersama ,dan / atau perubahannya.

2. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa.

#### **B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha**

### **Milik Desa (BUMDes) Pangkalan Tampo**

#### **1. Kepemimpinan, Manajerial, Tata kelola dan Komisaris (Pemerintah Desa)**

Komisaris atau biasa disebut juga dengan Pemerintah Desa merupakan organ perseroan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan baik secara umum maupun secara khusus yang sesuai dengan anggaran dasar yang ada dan juga memberikan nasehat kepada Direksi dan juga kepala unit yang memiliki usaha dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta memberikan pendapat maupun saran mengenai masalah apa saja yang dianggap cukup penting untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Untuk melaksanakan kewajiban, adapun wewenang dari komisaris untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala hal yang menyangkut dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan juga melindungi Badan Usaha Milik Desa mengenai hal yang akan merusak citra dan kelangsungan dari Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu wadah usaha desa yang memiliki sifat mandiri, rasa kebersamaan dan semangat gotong royong antara masyarakat dan pemerintah desa nya untuk mengembangkan lagi aset-aset lokal untuk meningkatkan pelayanan dalam pendapatan ekonomi desa maupun masyarakat. Badan Usaha Milik Desa meruakan salah satu program dari pemerintah desa untuk untuk memperdayakan masyarakat

yang ada di desa tersebut, jadi komisariss atau yang disebut juga dengan pemerintah desa sangat bertanggung jawab dalam memberikan terhadap Badan Usaha Milik Desa untuk mengembangkan ekonomi yang ada di desa tersebut dan juga dalam memperdayakan masyarakat.

KMT (Kepemimpinan, manajerial dan tata kelola merupakan kunci pembuka pada setiap jenis Badan Usaha Milik Desa. Kepemimpinan, manajerial dan tata kelola adalah faktor yang mendasari keberlangsungan dan juga kesehatan Badan Usaha Milik Desa. Kepemimpinan, manajerial dan tata kelola tidak sepenuhnya bisa membuat Badan Usaha Milik Desa sehat, berkelanjutan dan juga kokoh, namun jika Kepemimpinan, manajerial dan tata kelola kurang baik atau buruk maka tidak menutup kemungkinan untuk Badan Usaha Milik Desa akan mati suri atau tidak lagi berjalan. Jadi untuk setiap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pengurus yang ada di dalamnya harus memahami prinsip-prinsip apa saja yang digunakan dalam pengelolaannya agar setiap tugas yang dilakukan berjalan dengan sangat baik dan efektif.

## 2. Skala dan Jangkauan Usaha

Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi (penghulu junjung) pada saat ini memiliki tiga unit usaha diantaranya depot air minum, LPG, kredit HP. Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi tidak berjalan sebagaimana seharusnya karena terdapat beberapa kendala dari masyarakat itu sendiri,

seperti banyak nya galon yang ditukar, adanya mitra warung yang berhutang untuk penyetokan LPG, dan nasabah yang kredit hp banyak yang berhutang. Adapun faktor yang aling menghambat perkembangan dari Badan Usaha Milik Desa ini adalah pada penjualan hp yang mana banyaknya nasabah/pelanggan yang menunggak sehingga modal yang ada menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan baik untuk usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi ini menjadi kurang berkembang karena kendala dari masyarakat itu sendiri.

## 3. Kerjasama

Disetiap usaha memiliki kerjasama dengan pihak lain karena harus memiliki kaitan dengan sektor yang lain, hal itu akan sangat berpengaruh dalam keberlanjutan sebuah usaha. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa akan menjadi kuat dan dinamis dengan adanya jarnjan kerjasama yang saling melengkapi atas usaha di setiap unit yang dilakukan. Contohnya seperti Badan Usaha Milik Desa A saat ini memiliki unit usaha dalam menyediakan bahan baku, sedangkan Badan Usaha Milik Desa B memliki unit usaha dalam produksi, dan untuk Badan Usaha Milik Desa C memiliki unit usaha dalam hal pemasaran, jadi dari ketiga Badan Usaha Milik Desa tersebut bisa melakukan kerjasama yang bersinergi untuk menyatuka kekuatan dari masing-masing Badan Usaha Milik Desa. Kerjasama yang baik akan sangat menguntungkan jika dilakukan untuk bersaing.

Kerjasama antar Badan

Usaha Milik Desa dalam pengadaan alat transportasi untuk mengangkut sawit dapat dijadikan salah satu contohnya. Mobil angkutan yang memiliki harga yang cukup mahal tidak dapat dibeli oleh Badan Usaha Milik Desa, maka dari itu Badan Usaha Milik Desa ini melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa lainnya untuk patungan dalam membeli truk tersebut untuk digunakan dalam mengangkut sawit kedua desa tersebut. Jadwal untuk pengangkutan sawit bisa dilakukan secara bergilir antara kedua desa, dimana harga untuk sewa truk lebih murah dibandingkan dengan sewa di perusahaan lain. Kerjasama seperti ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomis saja, namun juga akan mempererat kebersamaan antar desa tersebut.

#### **4. Emansipasi Lokal**

Badan Usaha Milik Desa ini ada karena arahan dari pemerintah yang pada umumnya tidak berjalan mulus dan sesuai dengan rencana. Masyarakat mempunyai kesan pertama yang kurang baik karena Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu proyek rancangan dari pemerintah, sama halnya seperti proyek-proyek yang banyak masuk ke dalam desa, sehingga daya tarik Badan Usaha Milik Desa terhadap masyarakat menjadi tidak kuat. Tapi tidak semua Badan Usaha Milik Desa yang dibawah oleh pemerintah berakhir dengan kegagalan, ada juga yang berkekelanjutan dan berjalan dengan baik. Diantara Badan Usaha Milik Desa yang berjalan dengan baik ini didorong dengan dengan kecepatan transformasi dari Badan

Usaha Milik Desa yang awalnya dilabeli dengan “proyek pemerintah” diganti menjadi Badan Usaha Milik Desa baik dimiliki oleh pemerintah di desa maupun milik masyarakat di desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa itu diterima dengan sangat baik oleh masyarakat desa serta memiliki daya yang terikat dengan sistem yang ada di desa, modal sosial serta tradisi di desa.

#### **5. Tradisi Berdesa**

Tradisi berdesa ini bukan hanya sekedar tradisi turun temurun yang dilakukan oleh negara atau disebut juga dengan tunduk serta patu kepada kebijakan dan regulasi yang dilakukan Negara, tradisi berdesa ini juga disebut sebagai parochial dalam masyarakat atau tolong menolong yang dilakukan atau didasari dengan garis keturunan, agama, garis kekerabatan, etnis atau hal yang lainnya. Adapun unsur yang terkandung dalam tradisi berdesa ini yaitu unsur bermasyarakat dan unsur bernegara.

Tradisi berdesa ini dapat dijadikan basis sosial atau basis yang dapat memupuk modal sosial, yakni memupuk dalam hal kerjasama, swadaya tradisi solidaritas, gotong royong yang dapat melampaui batas-batas eksklusif seperti suku, agama, kekerabatan, aliran dan sejenisnya. Tradisi berdesa ini memiliki kekuasaan dan pemerintahan, yang didalamnya terdapat kewenangan dan akuntabilitas yang dapat mengatur serta mengurus seluruh kepentingan untuk masyarakat sekitar. Ketika amanat dari masyarakat koheren dengan otoritas dan akuntabilitas,

maka kepercayaan dari masyarakat itu sendiri akan meningkat dan kuat. Sehingga pemerintah desa dapat menjalankan fungsi proteksi dan distribusi dasar kepada masyarakat.

Di Desa Pangkalan Tampoi pada saat ini bisa dikatakan tidak ada lagi tradisi berdesa, dimana bisa dilihat bahwa Desa Pangkalan Tampoi sudah tidak ada lagi asas dalam hal bergotong royong, kekerabatan dan kerjasama yang terjadi di Desa Pangkalan Tampoi. Tradisi berdesa di Desa Pangkalan Tampoi hilang dikarenakan setiap ada nya pembangunan yang dilakukan dan diselenggarakan di Desa Pangkalan Tampoi dijadikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai proyek yang dapat menguntungkan untuk mereka sendiri, oknum tidak bertanggung jawab ini biasanya adalah para petinggi dari Desa Pangkalan Tampoi. Karena hal itu, masyarakat yang ada di Desa Pangkalan Tampoi saat ini kurang memiliki minat atau asas untuk bergotong royong, kekerabatan dan kerjasama yang membuat Desa Pangkalan Tampoi tidak memiliki tradisi berdesa.

## **PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dimana sudah dilaksanakan di Desa Pangkalan Tampoi mengenai hambatan dalam pelaksanaan Bumdes, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi pada saat ini belum berjalan maksimal dikarenakan dalam pembentukan

Badan Usaha Milik Desa ini tidak didirikan berdasarkan dengan aturan yang sudah ditetapkan ditambah dengan modal yang sangat minim yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi. 2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat tumbuh kembangnya Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi antara lain (a) tidak banyaknya menjalin kerjasama dengan pihak lain dikarenakan Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi hanya menjalankan tiga unit usaha, (b) semangat emansipasi lokal tidak ada dalam Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi, (c) kurangnya kekuatan dari tradisi berdesa sehingga tidak ada solidaritas, gotong royong dan kerjasama antar masyarakat di desa.

### **2. SARAN**

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis bisa memberikan saran dan masukan sebagai berikut : 1. Badan Usaha Milik Desa sebaiknya dibentuk sesuai dengan musyawarah masyarakat desa sebagaimana diatur dalam peraturan yang sudah ada, agar Badan Usaha Milik Desa ini dikelola oleh orang-orang yang profesional dan memiliki pengalaman dalam berwirausaha yang mana Badan Usaha Milik Desa ini bisa berjalan dengan sangat baik. 2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa haruslah memberikan dukungan yang sangat penuh untuk proses tumbuh kembangnya Badan Usaha Milik Desa Pangkalan Tampoi dalam pembangunan masyarakat di Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barniat, Z. (2018). Otonomi Desa Konsep Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol 2, No 107–120.
- Febryani, Nurmalia, Lesmana, Ulantari, Dewi, & Rizky. 2019. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jurnal ilmiah dan akuntansi, Vol 8, No 7-15
- Ifitah, & Wibowo. 2022. Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol 1, No 17–36.
- Maryuni. 2008. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa: Pustaka Setia.
- Ratna. 2012. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Sosial Budaya*, Vol 9, No 22–34.
- Riant Nugroho 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT Elex Media Komputindo.
- Simandjuntak, R. 2015. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional : *Jurnal Hukum Dan syariaah*, Vol 7, No 1-14.
- Sri, & Dewi, 2014. Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( Pades ) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Vol 1, No 1–14.
- Sururama, & Masdar. 2020. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) Desa Batetangga *Jurnal Media Birokrasi*, Vol 6 No 87–108.
- Sutoro, Eko. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Welli Indra Mayu. 2016. Faktor-Faktor Yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu *Jurnal Jom Fisip*, Vol 3 No 2-8.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.